

EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Marselina Maris

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

marismarselina16@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang “Ekonomi Politik dalam Pembangunan Infrastruktur Desa “. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan pemenuhan terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembangunan infrastruktur pedesaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka. Metode Studi pustaka yaitu kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono). Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pembangunan Infrastruktur khususnya di Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2019 anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat 157 % dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun .

Kata kunci : Ekonomi, politik, pembangunan, infrastruktur, pedesaan.

Abstract

This study examines "Political Economy in Village Infrastructure Development". Infrastructure development is one of the efforts made to meet the needs of the community by fulfilling the facilities that can support a better life together. The purpose of this study is to determine the development of rural infrastructure in Indonesia. The research method used in this research is the literature study method. Methods Literature study, namely theoretical studies, references, and other scientific literature related to culture, values and norms that developed in the social situation under study (Sugiyono). The results obtained from this study are that the development of infrastructure, especially in Indonesia, has increased. In 2019, the infrastructure spending budget reached IDR 420 trillion. This figure increased 157% from 2014 which was only Rp. 163 trillion.

Keywords : Economy, Politics, Development, Infrastruktur, Rural

Pendahuluan

Ekonomi Politik Internasional mempelajari kehidupan dalam ekonomi global, dengan fokus pada perjuangan politik antara yang kuat dan yang lemah di pasar ekonomi global. Pasar ekonomi global ini meningkatkan pendapatan beberapa orang dan menurunkan pendapatan orang lain. Menurut Oatley (2006), studi ekonomi politik internasional (EPI) adalah studi tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi untuk membentuk kebijakan pemerintah. Ekonomi politik global adalah interaksi antara pasar dan pemain kuat seperti negara, perusahaan multinasional dan organisasi internasional Gilpin (2005). Konsekuensi distribusi adalah persaingan politik di dari pasar ekonomi global ini tingkat nasional dan internasional, dengan yang kuat mencari lebih banyak "koneksi" dalam ekonomi global untuk meningkatkan pendapatan mereka, sedangkan yang lemah berusaha menghilangkan kendala ekonomi di tingkat global dan nasional untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkannya. Ekonomi Politik Internasional mempelajari bagaimana perjuangan politik antara yang kuat dan yang lemah di pasar ekonomi global membentuk evolusi ekonomi global. (Oatley, 2006).

Sejak zaman Hindia Belanda, sejarah politik dan ekonomi Indonesia tetap dalam keadaan oposisi biner. Di era kolonial, dualisme ini terjadi dalam anggapan bahwa ekonomi Indonesia pra-kapitalis harus berhadapan dengan ekonomi kolonial kapitalis. Oposisi biner ini mengakibatkan keterasingan ekonomi pribumi dari praktik ekonomi pemerintah kolonial. Ekonomi politik pembangunan adalah studi tentang pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik dalam bidang ekonomi tertentu. Membahas perkembangan barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teori, kajian ekonomi politik dalam pembangunan dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menganalisis berbagai masalah Sosial yang terkait dengan pembangunan isu-isu umum proses kebijakan dan pembangunan (Suryono, 2006 : 10).

Juga, berguna untuk mengetahui mengapa dan bagaimana kebijakan pembangunan (baik ekonomi dan politik) dibuat dan dilaksanakan di suatu negara dan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Pembangunan sebenarnya mencakup dua isi utama : pertama adalah masalah bahan yang akan diproduksi dan dibagikan, dan yang lainnya adalah masalah manusia sebagai pemrakarsa dan pembangunan manusia . bagaimanapun, pembangunan pada akhirnya

harus mengarah pada pembangunan manusia. orang-orang yang dibangun adalah orang-orang kreatif, dan untuk menjadi kreatif, manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan melibatkan lebih dari sekedar produksi dan distribusi barang-barang material. Pembangunan harus menciptakan kondisi bagi kreativitas manusia (Budiman, 1995;13-14).

Pembangunan (development) merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Pada suatu negara, ada beberapa macam pembangunan yang diterapkan antara lain seperti pembangunan ekonomi, politik, pendidikan, dan infrastruktur. Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi barang dan jasa antara pembeli dan penjual (Macmillan Dictionary Of Modern Economics, 1996). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi negara tidak terlepas dari pengaruh infrastruktur yang ada didalam negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya infrastruktur desa.

Infrastruktur desa merupakan infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005). Hal ini berarti kelangsungan hidup dan kemakmuran rakyat lebih diprioritaskan. Secara fisik dapat berupa pembangunan dalam bidang fasilitas umum contohnya seperti jalan raya, jembatan, tempat pelayanan kesehatan, instansi pendidikan (sekolah), dan beberapa fasilitas lain yang menunjang kesejahteraan rakyat. Namun faktanya masih banyak infrastruktur yang kurang memadai bahkan jauh dari harapan yang bisa dinikmati atau digunakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung aktivitas wilayah. Hal lain juga disebabkan karena masih kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri.

Kerangka Teori

Ekonomi Politik

Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah “branch of science of a statesman or legislator” dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional (Gilpin, 1987). Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat (Mas’oed, 2008). Secara sederhana ekonomi-politik dapat didefinisikan sebagai bidang studi yang menganalisis masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat adanya dua lembaga paralel “negara” dan “pasar” dan interaksi yang dinamik diantara keduanya dalam dunia modern (Mas’oed, 2001). Interaksi yang dipelajari oleh ekonomi-politik bisa digambarkan dalam berbagai cara.

Ekonomi politik berkaitan dengan konflik mendasar antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat di mana mereka tinggal. Dengan kata lain ekonomi politik adalah studi tentang masalah - masalah yang muncul akibat ketegangan antar pasar, dimana individu – individu berpartisipasi dalam mengejar kepentingannya sendiri, sedangkan negara adalah yang sama yang bertindak secara kolektif untuk kepentingan masyarakat. Ekonomi politik yaitu suatu analisa terhadap kegiatan politik yang didalamnya terdapat penyaluran kekuasaan yang berasosiasi dengan sektor ekonomi-politik (Rachbini 1996: 9). Dalam hal ini, terdapat suatu komponen mengenai perencanaan, penganggaran dan pengalokasian sumber daya ekonomi oleh pemilik kekuasaan yang tercermin pada lembaga pemerintah dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Proses pembangunan disuatu negara, terutama di Indonesia lebih mengarah pada suatu struktur politik, yang mana struktur politik ini menjadi tonggak utama dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat digunakan sebagai kepentingan ekonomi (Stanilnad dalam Rachbini, 1996). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan pemenuhan terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kehidupan bersama yang lebih baik.

Pembangunan Infrastruktur

a. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Infrastruktur pedesaan merupakan infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).

Tujuan pembangunan infrastruktur pedesaan:

- a) Dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- b) Dalam jangka menengah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar di wilayah pedesaan
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur pedesaan

Sasaran :

- a) Tersedianya infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b) Meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur pedesaan .
- c) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di pedesaan.

b. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, memberikan definisi mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Adapun definisi Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang dibangun untuk melewati suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau

rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya³. Penjelasan Pasal 86 ayat (3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

Dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan, maka penyelenggara harus memperhatikan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan. Namun dengan banyaknya kerusakan jalan dan jembatan hampir pada sebagian besar daerah di Indonesia, Pemerintah dianggap gagal membangun jalan dan jembatan sesuai standar teknisnya. Untuk itu, perlu segera dilakukan engineering audit terhadap penyelenggara jalan. Kerusakan struktural jalan dipengaruhi tiga faktor penting, yaitu: Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading); Kedua, kondisi drainase permukaan jalan; dan Ketiga, mutu pelaksanaan konstruksi jalan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mutu pelaksanaan konstruksi jalan. Mulyono (2008) menyimpulkan ada lima aspek teknis yang memengaruhi mutu pelaksanaan, yaitu: Pertama, ketepatan pemilihan material; Kedua, ketepatan kualitas peralatan lapangan; Ketiga, ketepatan pengujian mutu; Keempat, ketepatan disain; Kelima, kompetensi pelaksana di lapangan. Fakta lapangan menunjukkan ketidaktepatan pelaksanaan yang terjadi karena lemahnya pengendalian aspek mikro oleh kontraktor dan pengawas. Salah satu kendala yang sering diungkapkan penyelenggara jalan adalah ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang mensyaratkan tender terbuka sehingga memerlukan jeda waktu dalam tender penanganan jalan. Langkah untuk mengantisipasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan :

Melakukan kontrak multi tahun berbasis kinerja (performance based contract) kepada kontraktor, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera memperbaiki kerusakan jalan dalam jangka waktu terkontrak. Melakukan audit mutu konstruksi jalan, audit sistem drainase dan tata air penunjang, serta audit beban muatan lebih angkutan barang. Kontrak berbasis kinerja dapat juga dilakukan dengan membundel

pengelolaan jembatan timbang dengan pemeliharaan jalan. Melakukan engineering audit terhadap jalan dan jembatan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki, sehingga apabila ditemukan penyelewengan dapat segera ditindak. Engineering audit tersebut meliputi proses konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, konsultan, proses tender, pengawas, hingga proses penyerahan dari kontraktor ke penyelenggara jalan saat perbaikan jalan dinyatakan selesai.

c. Pembangunan Irigasi

Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh:

- a) keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- b) keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- c) Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
- d) meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan
- e) Diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Metode penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian proses penelitian untuk mencari data dan fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta sebagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nasir). Adapun pendapat lain mengatakan bahwa studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono).

Ciri utama penelitian kepustakaan

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang bias dikembangkan dalam studi fisiologi, dll. Jadi perpustakaan adalah laborat peneliti kepustakaan dan arena itu, teknik membaca teks menjadi bagian fundamental dalam penelitian kepustakaan.
2. Data pustak bersifat siap pakai (*ready made*), artinya peneliti tidak kemana-mana kecuali diperpustakaan. Meskipun demikian, peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan tentu masih perlu mengenal seluk beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.
3. Data perpustakaan umumnya sumber skunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan.
4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang terimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

Tahapan Penelitian Studi Kepustakaan

1. Mendaftar semua variabel yang perlu diteliti
2. Mencari setiap variabel pada subjek encyclopaedia

3. Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia.
4. Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah yang diteliti
5. Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti
6. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urusan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang diteliti
7. Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Untuk keperluan ini biasanya peneliti dapat menggunakan beberapa bahan yakni publikasi jurnal, berita nasional, dan Koran

Teknik Pengumpulan Data

Data yang ada dalam perpustakaan dikumpulkan dan diolah dengan cara ;

1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain.
2. Organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan
3. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil perorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah

Hasil dan pembahasan

Hasil Penelitian

Pembangunan infrastruktur pedesaan di Indonesia selalu diprioritaskan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sejak awal pemerintahan presiden Jokowi terus menggebut pembangunan infrastruktur. Para

menteri pada kabinet juga selalu menekankan pentingnya infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Di tahun 2019 anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 420 triliun. Angka ini meningkat 157 % dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Adapun infrastruktur yang dibangun yaitu bendungan, jalan tol, irigasi, embung (cekungan penampung), dan jembatan. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat terkait kemiskinan dan ketertinggalan desa, pemerintah daerah merancang kegiatan peningkatan infrastruktur pedesaan. Program peningkatan infrastruktur pedesaan dilaksanakan melalui program bidang pemberdayaan masyarakat. Peningkatan infrastruktur pedesaan meliputi pembangunan jalan desa, tembok penahan tanah, drainase, irigasai desa, jembatan desa, pasar desa, rehabilitas kantor desa, serta sarana dan prasarana air bersih.

Anggaran infrastruktur tahun 2021

Laporan mentri keuangan menunjukkan anggaran infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp 414,4 triliun.

Rencana pencapaian dibidang infrastruktur tahun 2021

- a. Rumah susun dan rumah khusus sebanyak 10.76 unit
- b. Bendungan sebanyak 53 unit
- c. Jalan sepanjang 965,4 kilometer
- d. jembatan spanjang 26,9 kilometer
- e. jalur kereta api sepanjang 446,56 kilometer
- f. bandara sebanyak 10 unit/lokasi

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Pedesaan

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yg penting karena mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat. Suatu wilayah Jika memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan, kebalikannya suatu wilayah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik/tidak terpenuhi maka perekonomian daerahnya bisa mengalami penurunan. Peningkatan

perekonomian suatu wilayah akan membangun kesejahteraan rakyat sebagai akibatnya pembangunan infrastruktur jalan sangat penting.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk diperhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana serta prasarana infrastrukturnya. Namun sampai saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yg dilakukan didaerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pada desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan rakyat yg terdapat di desa terkait duduk perkara pembangunan yang akan dilakukan.

Pemerintah terlihat hanya mengakibatkan desa sebagai objek pembangunan. sebagai akibatnya yang terjadi desa dipaksa buat mendapatkan program pembangunan berasal pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tadi. pertarungan tersebut membuahkan masyarakat kemudian menduga pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diharapkan sang warga . menggunakan kondisi yang mirip ini mengakibatkan infrastruktur yang telah terbangun tadi manfaatnya sebagai tidak tepat target, tidak tepat guna dan tidak sempurna ketika pada akhirnya infrastruktur yg telah terbangun tersebut tidak dapat merampungkan konflik yg terdapat.

Ekonomi Politik dalam pembangunan infrastruktur desa

UU No. 6 Tahun 2014 menjadi pintu gerbang agenda strategi pembangunan leverage kemakmuran desa dan antar desa. Memasuki tahun ke-4 UU Desa, isu-isu mendasar dan strategitersebut mulaiperbincangan publik yang serius,. Diantara isu itu adalah tentang aset desa. Kepentingan kolektif desa dan antar desa yang paling utama diantaranya bagaiman memperkuat aset desa. Perseolan aset desa menjadi penentu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Aset selain berhubungan dengan memiliki termasuk menentukan posisi tawar desa ketika berhuungan dengan pasar, juga berkaitan dengan konsolidasi serta distribusi kekayaan desa. Dua faktor ini yang paling menentukan untuk mengukur tingkat ekonomi, kedelautan, dan kemandirian desa. Inilah yang menjadi fagus aspekatif ekonomi politik aset desa.

Isu strategis penataan aset desa terasuk mengenai manajemen aset yang dimiliki oleh desa. Dalam perspektif baru, aset desa juga membicarakan kepentingan mengenai upaya-upaya inventarasi, pengembangan serta pendistribusiannya kembali. Benturan kepentingan bisa saja terjadi fakta yang tidak bisa dihindari ketika desa memperkuat diri, apalagi pada saat masuk wilayah yang paling sensitif mengenai penataan aset desa tersebut. Di Indonesia desa pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Wamer Muntinghe, anggota Raad Van Indie dari belanda pada masa penjajahan colonial Inggris, yang meupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada 1811 di Indonesia. Terbentuknya desa sebagai tempat tinggal kelompok disebabkan oleh adanya nalurialamiah untuk mempertahankan kelompok. Dimana dikelompo tersebut kemudian menjalin hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan pada hubungan kekeluargaan, karena berada tidak jauh hingga dekatdari arena kesamaan kepentingan.

Undang – undang desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan prningkatan kesejahteraan masyarakat. Desadiberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengolah potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat diterapkan dalam pengolahan desa dengan melibatkan masyarkat adalah perlunya melakukan denga pola sekelola diman menggunakn tenaga kerja yang setempat dan memanfaatkan bahan lokal yang ada didesa. Dengan upaya ini perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga dana yang digunakan untuk membangun tersebut tidak akan mengalir keluar desa.

Pembangunan Inrastruktur desa disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini bukan keinginan masyarakat itu sendiri. Dari pengambilan keputusa yang kemudian diputuskan apa saja yang ingin dibangun sesuai dengan musyawarah yang telah dilakukan dengan masyarakat, pada saat nanti dilakukan perencanaan pembangunan dan aparat desa dharapkan dalam pengeluaran dana yang dilakukan agar tidak adanya suatu tindakan menyimpang dan memanimalisir ketidaktepatan sasran yang yang akan dibangun dalam hal ini masyarakat harus dijadikan sebagai aktor dalam pembangunan sehingga pembangunan terwujud untuk masyarakat sendiri. Disamping itu pembangunan infrastruktur desa berbasis masyarakat adalah:

- a. Dapat meningkatkan akses bagi masyarakat miskin, kaum perempuan termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur desa diwilaya pedesaan.
- b. Peranan masyarakat dalam membangun kesadaran serta kemandirian untuk dapat mengatasipermasalahan dengan infrastruktur desa yang telah disediakan.
- c. Peran aktif seluruh masyarakat desa diharapkan, dalam proses pengambil keputusan dan pengelolaan pembangunan didesa.
- d. Menjaga kapasitas kelembagaan msyarakat desa ang kuat,mengakar dan terpercaya.
- e. Meningkatkan energi masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, swasta lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, agar upaya pemberdayaan masyarakat desa bisa efektif.

Penutup

Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pedesaan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketertinggalan desa. Untuk pemerintah kedepannya agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok-pelosok dan perbatasan, agar terjadi pemerataan dan keadilan. Akan tetapi dalam menjalankan pembangunan infrastruktur kedepannya alangkah baiknya pemerintah merancang skema baru agar tidak terlalu membebankan uang negara.

Daftar Pustaka

Fajar A , 2020 “Analisis Efektivitas Infrastruktur

Pengairan (Irigasi) Terhadap Pendapat Masyarakat Petani Padi Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” . *Skripsi* . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Ekonomi Pembangunan . Makasar : Universitas Muhammadiyah .

NSS Prapti Lulus, Edi Suryawardana dan Dian Triyani, 2020. Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang

Vasha Vani Rahima, Febriandi, 2021 Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kecamatan Pariaman Selatan *Jurnal Buana* Vol.5 No.2

Hidayat A. R. 2022 Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *EKOMBIS REVIEW. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10(1) DOI : <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>.

Salsabila dan Yohana Manulang, 2021 Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2

Hariyanto Yoga, Shulis dan Figur Adhiyakam, 2021 Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* Volume 12 Nomor 1

Panto A. Indra, Sofia Pangemanan, dan Ventje Kasenda, 2018. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Aktivitas Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Volume 1 Nomor 1

Ridha Muhammad, 2016. Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 04 Nomor 1

Biamding, Hariawan. 2019. *Perencanaan pembangunan partisipasif Desa*. Sleman: CV. Budi Utama

Soleh, Ahmad. 2017. *Strategi Pembangunan Potensi Desa*. Jurnal sungkai, volumn 5. Nomor, 1

Haryanto, Yoga Dkk. 2021. "Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur".
Journal. Develonpment, the role of village governmrnt, infrastructure. Volume
12. Nomor. 1. Kalimantan Barat: SMA Negeri 4 Pontianak.